



## **LAPORAN SINGKAT**

### **KOMISI VIII DPR RI**

**BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).**

---

Rapat Ke	: 16
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat/ke-	: RDP / ke-1
Dengan	: <b>Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewan Pengawas BPKH</b>
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: <b>Rabu, 25 Juli 2018</b>
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: <b>DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si</b>
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si
Acara	: 1. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Tahun 2019 serta 2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Semester I Tahun 2018
Hadir	: ..... orang dari 49 orang Anggota Komisi 1. Kepala Badan Pelaksana, 2. Ketua Dewan Pengawas

## I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka RDP Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas BPKH pada pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Dewan Pengawas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas **“Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji Semester I Tahun 2018”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk menyampaikan rincian Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019 kepada Komisi VIII DPR RI paling lambat tanggal 1 Agustus 2018. Selanjutnya, RKAT akan dibahas pada rapat konsinyering antara Komisi VIII DPR RI dan BPKH.
2. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk melengkapi laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pengelolaan keuangan haji semester I tahun 2018. Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI mendesak BPKH untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan haji Semester I tahun 2018 secara lebih rinci yang telah disetujui Dewan Pengawas BPKH kepada Komisi VIII DPR RI.
3. Komisi VIII DPR RI menyetujui kerja sama BPKH dengan Kementerian Agama RI untuk melakukan pengadaan gedung pemondokan, transportasi, dan katering di Arab Saudi dengan tujuan efisiensi BPIH Tahun 2019.
4. Komisi VIII DPR RI meminta BPKH untuk menjelaskan secara lebih rinci mengenai kerja sama dengan Kementerian Agama RI untuk melakukan investasi jangka panjang beberapa gedung pemondokan, transportasi udara, dan katering di Arab Saudi yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas BPKH.

5. Komisi VIII DPR RI mendukung rencana Dewan Pengawas BPKH terkait sustainabilitas keuangan haji, penggunaan metode finansial dan aktuarial dalam penetapan BPIH, dan pengakuan efisiensi BPIH sebagai kinerja BPKH bersama Kementerian Agama RI.
6. Komisi VIII DPR RI mendorong BPKH untuk segera melakukan penyelesaian seluruh peraturan, standar akuntansi, penyediaan SDM, dan kantor BPKH yang layak dan efisien.
7. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH untuk menindaklanjuti secara serius tanggapan dan masukan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Mempercepat pelaksanaan penggunaan nilai manfaat dari Dana Abadi Umat (DAU) untuk kemashlahatan umat dan mengatasi hambatan-hambatan yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan.
  - b. Memprioritaskan rencana pengalokasian program kemashlahatan umat pada pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan dan dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, kesehatan, dan pelayanan ibadah haji.
  - c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat bersama Komisi VIII DPR RI terkait kebijakan-kebijakan BPKH dalam pengelolaan keuangan haji.
  - d. Meningkatkan efisiensi penggunaan biaya operasional dengan memperhatikan rasio belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
  - e. Membuat kebijakan penyediaan kebutuhan Mata Uang Asing bagi penyelenggaraan ibadah haji untuk mengantisipasi munculnya kerugian akibat fluktuasi mata uang.
8. Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat kerja dengan Menteri Agama dan Kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah regulasi yang terkait dengan BPKH.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.20 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
WAKIL KETUA,**

**Ttd.**

**DR. H. TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si**